

Penelitian tentang konflik separatisme di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh peneliti, seperti Karl D. Jackson, Anhar Gonggong yang telah meneliti separatisme yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Karl D. Jackson dalam melihat konflik separatisme dengan lebih mengedepankan persoalan legitimasi pemimpin yang kharismatik sebagai variabel independen.¹ Artinya separatisme muncul sebagai bagian dari mobilisasi seorang elite kepada massa terhadap masalah politik, ekonomi ataupun budaya. Sehingga Jackson cenderung melacak *underlying factors*, mengapa seorang Kartosuwiryo memberontak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Anhar Gonggong cenderung melakukan analisis hubungan antara peranan adat *sirri passe* yang dianut elit politik yang digunakan sebagai *precipating factors* bagi konflik hubungan militer pusat dan daerah dalam kasus pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.² Ketersinggungan politik dari elit menjadi faktor picu yang signifikan bagi lahirnya pilihan politik untuk melakukan separatisme. Sehingga dalam konteks separatisme di etnis religius, Anhar Gonggong lebih mempergunakan perspektif primordialist dalam menjelaskan alasan-alasan Kahar Muzakar memberontak.

Penelitian tentang gerakan separatisme Filipina telah dilakukan oleh Cesar Adib Majul yang melakukan analisis tentang faktor-faktor yang mendasari Revolusi Bangsa Moro di Filipina di dekade 1970-an.³ Tesis Majul menyatakan bahwa perlawanan bangsa Moro di Mindanao terhadap pemerintah Filipina sangat didasari oleh kebijakan pemerintah Filipina yang berusaha menghilangkan identitas Moro dengan diganti identitas Filipina. Sehingga reda tidaknya konflik sangat ditentukan oleh *political will* dari Filipina dibandingkan dengan tuntutan atau aksi dari

¹ Karl D Jackson, *Authoritas Legitimasi Pemimpin Tradisional: Studi Pemberontakan DI/TII*, Jakarta, Rajawali, 1990

² Anhar Gonggong, *Kahar Muzakkar: Dari Patriot Menjadi Pemberontak*, Jakarta, Gramedia, 1994

³ Cesar Adib Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Jakarta, LP3ES, 1989

masyarakat Moro. Dalam konteks ini, Majul lebih mempergunakan pendekatan konstruktivis dalam menganalisis konflik Mindanao.

Penelitian tentang pola penyelesaian konflik di Mindanao telah dilakukan Precillano D. Campodo, dan Julkipli Wadi yang meneliti tentang keberhasilan *Final Peace Agreement* dalam menurunkan tensi konflik di Mindanao. Menurut Precillano, Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Conference*) telah menjadi *precipating factors* bagi proses moderasi tuntutan dari MNLF⁴. Kemampuan Organisasi Konferensi Islam yang secara intensif melakukan komunikasi kepada pemerintah Filipina dan faksi perlawanan Moro menjadi variabel independen bagi peredaan konflik. Sedangkan dalam tesis Julkipli Wadi menyatakan bahwa implementasi konsep diplomasi Islam yang dikembangkan Organisasi Konferensi Islam dengan yang mengedepankan aspek konsultasi dan konsensus menjadi preseden bagi peredaan konflik di Mindanao.⁵

Penelitian Mirriam Coronel Ferrer lebih menfokuskan kepada tidak terselesaikannya konflik yang sudah berjalan lama dan meskipun telah dilakukan berbagai treatment baik mediasi, negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Dalam analisis Ferrer, tidak terselesaikannya konflik Mindanao lebih disebabkan oleh multi faktorial, seperti kegagalan negara dalam menyediakan respon yang kohesif, kekecewaan atas hasil-hasil pembangunan, ketidakefektifan mekanisme otonomi dalam memberikan ruang bagi kompetisi kelompok politik, mudah dan rentannya pilihan berperang, rendahnya konsensus nasional untuk menyelesaikan masalah dengan cara

⁴ Precillano D. Campodo, *The MNLF-Organisasi Konferensi Islam Dyad and the Philippine Government's Policy Response to the Moro Struggle for Self-Determination* (Phd Philippine Studies Dissertation, Asian Center, University of Philippine, 1996 dan Saleem M. Adam, *The Role of Organisasi Konferensi Islam Diplomacy in the Muslim Struggle in Southern Philippines*, (PHD Philippine Studies Dissertation, University of Philippines, 2002), hal. 107-110

⁵ Julkipli Wadi, *Islamic Diplomacy: A Case Study of the Organisasi Konferensi Islam and the Pacific Settlement of the Bangsamoro Question (1977-1992)*, (MA Islamic Studies thesis, Institute of Islamic Studies, University of Philippine, 1993

damai, dan keterlibatan internasional aktor yang memperumit dinamika konflik.⁶ Dalam batas tertentu, pandangan Ferrer lebih melihat konflik di Mindanao dalam perspektif konstruktivis, belum tersedianya kontruksi yang kondusif dalam menyelesaikan konflik menyebabkan konflik jadi sulit diselesaikan.

Hampir mirip dengan tesis Ferrer, studi dari Asep Chaerudin terhadap fenomena separatism di Asia Tenggara menunjukkan bahwa keterlibatan aktor internasional dalam konflik separatism di Asia Tenggara berkecenderungan memperumit konflik. Salah satu ilustrasi yang menarik dari studi dari Asep Chaerudin adalah masuknya issue terorisme dalam konflik di Mindanao juga semakin memperumit konflik dan proses penyelesaiannya.⁷ Tesis Asep Chaerudin dalam batas tertentu juga menggunakan pendekatan konstruktivis dalam melihat dinamika konflik di Mindanao.

Sedangkan studi dari Einar Wigen maupun Rizal Buendia dalam melihat konflik di Mindanao agak berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan lebih mengedepankan pendekatan instrumentalis. Einar Wigen maupun Rizal Buendia melihat bahwa konflik di Mindanao tidak bisa dilepaskan dari upaya antar kelompok untuk memanfaatkan konflik untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya secara maksimal. Konflik dalam batas tertentu bisa dimobilisasi dan bisa direduksi sesuai dengan kepentingan yang paling menguntungkan.⁸

Seperti halnya Wigen, Abhoud Syed M. Lingga, melihat konflik di Mindanao juga dengan menggunakan perspektif instrumentalis. Namun yang menjadi unit analisis Lingga

⁶ Miriam Coronel Ferrer, "The Philippine State and Moro Resistance: Dynamics of A Persistent Conflict", dalam Kamarulzaman Askandar, Ayesah Abubakar, *Mindano Conflict*, Penang, SEACSN, 2005.

⁷ Asep Chaerudin, *Countering Transnational Terrorism in Souteast Asia With Respect to Terrorism in Indonesia and Philippines*, thesis in Naval Post Graduates Scholl Monterey, California, December 2003. Dan Rizal Buendia, "Looking into the Future of Moro Self-Determination in the Philippines, *Philippine Political Science Journal* 29, 2008

⁸ Einar Wigen, *The Mindanao Conflict: Actors, Grievances, and Mobilisation factors*, Thesis MA Peace and Conflict Studies EPU, Burg Schlaining Austria, Spring 2005

adalah pelaksanaan negosiasi untuk menyelesaikan. Menurut Lingga negosiasi tidak bisa menyelesaikan konflik Mindanao karena kecacatan tentang issue yang akan dinegosiasikan, sebagai akibat dari kekhawatiran masing-masing pihak yang bernegosiasi terhadap terhadap negosiasi dan prospek negosiasi bagi masa depan pihak-pihak yang berkonflik. Lingga menegaskan kecacatan negosiasi disebabkan karena partisipasi aktor internasional dan nasional dalam negosiasi cenderung didominasi oleh pragmatisme sesaat sehingga negosiasi tidak menyentuh substansi masalah.⁹

Tampaknya studi tentang hubungan antara negosiasi dengan tetap berlangsungnya konflik pasca negosiasi belum banyak dikaji. Masih terdapat ruang kosong yang luas untuk dieksplorasi lebih jauh untuk menemukan faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Studi Lingga memang sudah mulai menyentuh tentang kegagalan dan cacat negosiasi yang dilakukan selama ini. Namun tesis Lingga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena cenderung melihat kecacatan negosiasi secara terpisah-pisah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi faktor kunci dari kegagalan negosiasi dalam penyelesaian konflik Mindanao.

Penelitian disertasi ini akan memberikan penjelasan baru tentang kegagalan negosiasi dalam menyelesaikan konflik di Mindanao. Ruang yang akan coba dieksplorasi adalah terletak dari bangunan negosiasi itu sendiri terkait dengan karakter konflik di Mindanao yang memiliki keragaman faksi sehingga rentan timbulnya politisasi negosiasi oleh elit-elit yang terlibat dalam negosiasi. Politisasi negosiasi sebagai sebuah konsep yang krusial dalam kegagalan negosiasi, diperkenalkan pertama kalinya oleh Harold Nicholson. Namun konsep politisasi negosiasi yang dibangun oleh Nicholson masih bersifat elementer. Dalam pandangan Nicholson, politisasi

⁹ Abhoud Syed M. Lingga, "Mindanao Peace Process: Need for New Formula", dalam Kamarulzaman Askandar, *op.cit.*

negosiasi lebih disebabkan oleh factor-faktor administratif dari penyelenggaraan negosiasi seperti proses persiapan, tata cara pelaksanaan, etiket negosiasi.¹⁰

Jelas penjelasan Nicholson tentang politisasi negosiasi yang bermakna administratif cenderung tidak bisa menjelaskan kegagalan *Final Peace Agreement* 1996 yang disusun secara sistematis dan komprehensif baik oleh OKI, Pemerintah Filipina, MNLF, Libya dan Indonesia sebagai fasilitator. Ali Alatas tatkala memberikan sambutan setelah penandatanganan naskah perjanjian memberikan pernyataan optimisnya bahwa konflik Mindanao akan segera terselesaikan secara baik. Terlebih *Final Peace Agreement* 1996 juga dibangun dengan *political will* yang lebih baik dibandingkan dengan *Tripoli Agreement* yang terkesan dilaksanakan secara tergesa-gesa di 1976.

Penelitian disertasi ini akan mengembangkan konsep politisasi negosiasi terkait dengan makna yang lebih substantif terhadap bangunan efektifitas negosiasi terkait dengan terdapatnya faksionalisasi yang divergen pada salah satu pihak dari aktor negosiasi. Penjelasan tentang politisasi negosiasi substantif ini diharapkan akan dapat menjelaskan mengapa negosiasi yang dilakukan guna menyelesaikan konflik di mana dalam aktor konflik terdapat faksionalisasi seringkali tidak efektif.

¹⁰ Lihat dalam Victor A Kremenyuk (ed.), *International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues*, San Fransisco, Jossey-Bass, 2002

**Matrik Penelitian Tentang Konflik dan Negosiasi
Perspektif Konflik di Asia Tenggara dan Filipina**

